

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Proses menyampaikan informasi dengan tujuan menjelaskan suatu krisis merupakan definisi dari komunikasi krisis (Syam et al., 2022). Hal yang menjadi landasan dari sebuah respons krisis adalah komunikasi. Mengutip dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011, komunikasi krisis merupakan sebuah penyampaian pesan antara instansi pemerintah serta masyarakat untuk menyamakan sebuah persepsi pada suatu penanganan krisis (sebelum, selama, dan sesudah krisis). Pemerintah mengelola komunikasi krisis dengan memberikan persepsi yang sesuai dengan realitas atau kenyataan, dalam hal ini memberi tahu masyarakat mengenai apa yang terjadi. Komunikasi krisis merupakan cara atau skema untuk mengurangi kerusakan reputasi suatu pemerintah atau organisasi.

Meskipun kajian komunikasi krisis telah dikaji oleh banyak akademisi, tetapi kiranya bidang keilmuan ini masih memiliki landasan sosiologis yang belum begitu kuat. Dikatakan demikian karena sejauh ini masih minim sekali elaborasi pemikiran terkait dengan konsep dasar sosial; seperti risiko, kepercayaan, konflik, opini publik, media massa, media sosial atau bahkan komunikasi dalam pembahasannya. Peran komunikasi krisis adalah agar dapat menciptakan persepsi publik selaras dengan realitas. Dalam hal terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakatnya diperlukan adanya komunikasi yang baik agar konflik tidak melebar. Penyampaian komunikasi yang tidak baik yang terjadi antara pemerintah dengan warga negaranya pernah terjadi dalam beberapa kasus. Kasus terbaru yang terjadi adalah warga Pulau Rempang. Masyarakat yang sudah mendiami Pulau Rempang sejak lama, kini harus menyerahkan tanah adat yang mereka diami-akan digusur karena proyek dari pengembangan pembangunan Pulau Rempang yaitu *Rempang Eco City*. Pemerintah Indonesia berdalih bahwa masyarakat Rempang akan direlokasi bukan digusur dari tanah adat mereka.

Pulau Rempang sendiri merupakan bagian dari sebuah pulau yang terletak pada wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada awalnya Rempang bukan berasal bagian Otorita Batam, namun semenjak dirilisnya Keputusan Presiden

(Kepres) Nomor 28 Tahun 1992, daerah kerja Otorita Batam semakin diperluas sampai meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Galang, dan pulau sekitarnya. Tiga suku asli yang sudah menempati pulau tersebut adalah suku Melayu Galang, Orang Darat, dan Orang Laut. Sejarah Pulau Rempang sendiri telah dimulai pada abad ke-19 atau kurang lebih tahun 1834, bahkan semenjak zaman penjajahan Belanda sudah dimulainya peradaban pada Pulau Rempang, Galang serta sekitarnya.

Artikel yang berjudul “Verslag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang” atau “Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang” yang diterbitkan pada 04 Februari 1930 merupakan bukti dari kunjungan awal Belanda ke Pulau Rempang. Dalam keterangan manuskrip Belanda berjudul *De Orang Benoea's of Wilden op Malaka in 1642* dalam “Joernal of the Indian Archipelago” karya Newbold 1849 berjudul “Account of Malaka”, masyarakat Pulau Rempang serupa dengan penduduk di wilayah Malaysia. Catatan tersebut menyebutkan bahwa penduduk Pulau Rempang disebutkan sebagai suku asli pulau tersebut (Ayuningmas et al., 2023). Kedua jurnal peninggalan Belanda menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Rempang telah menduduki pulau tersebut jauh di bawah tahun 1840-an, sehingga masyarakat Rempanglah penduduk asli pulau tersebut.

Rempang Eco City ialah proyek pengembangan pembangunan Pulau Rempang di Kota Batam. *Rempang Eco City* termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023, pembangunan proyek ini tertuang pada Peraturan Menteri Ketua Bidang Perekonomian nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023. Proyek pengembangan pulau Rempang ini merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG). *Rempang Eco City* ini telah direncanakan mulai 26 Agustus 2004 oleh pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tetapi mengalami ketertundaan dan kini sudah diresmikan menjadi daerah industri yang dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Tujuan dari proyek pembangunan ini akan dijadikannya Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, sampai wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan negara Singapura serta Malaysia. Selain itu proyek ini juga bertujuan untuk menarik wisatawan dari Singapura, letak dari Pulau Rempang yang strategis bisa dicapai pada waktu yang singkat dari Singapura. Pengembangan proyek *Rempang Eco City* ini diharapkan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian, melalui

proyek ini Pemerintah Indonesia akan menargetkan dapat menyerap kurang lebih 306.00 tenaga kerja hingga tahun 2080 mendatang.

Di lansir dari halaman *website tempo.co*, status dari proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) semenjak Agustus 2023 lalu, menyebabkan proyek ini berjalan dengan cepat dimulai dari BP Batam yang melakukan proses pemasangan patok dan pengukuran lahan di Pulau Rempang pada Kamis, 7 September 2023. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlawanan dari masyarakat Pulau Rempang yang menolak digusur serta direlokasi. Konflik terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan gabungan. Masyarakat Rempang yang melakukan unjuk rasa melampirkan sejumlah tuntutan pada pemerintah mulai dari penolakan penggusuran pulau Rempang Galang, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) membubarkan posko yang didirikan di Rempang Galang, dan menghentikan intimidasi pada orang Melayu, serta menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan penggusuran kampung tua pulau Galang. masyarakat pulau Rempang juga meminta Presiden Joko Widodo mencopot Muhammad Rudi dari jabatannya sebagai Kepala BP Batam dan membebaskan warga Rempang Galang yang ditahan.

Adanya perlawanan dari masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan pemerintah belum menangani krisis ini dengan komunikasi yang tepat. Komunikasi krisis menjadi panduan dalam menyampaikan respons secara cepat begitu krisis terjadi, melalui pesan yang terbuka dan jujur pada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Prastya, 2011). Dengan begitu seharusnya pemerintah dapat menangani kasus ini dengan tanggap, tetapi malah yang didapatkan oleh masyarakat Rempang adalah pengabaian hak dan suara mereka. Pemerintah kerap kali mengabaikan aspirasi masyarakat daerah untuk mempertahankan tanah adat dengan alasan pembangunan yang spektakuler dengan menggunakan media massa sebagai corong pemerintah untuk pembenaran (Baun, 2022). Media massa cenderung menampilkan *spokesperson* atau juru bicara dari pemerintah yang terdiri dari menteri, gubernur, Walikota, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Kapolda), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui *spokesperson* atau juru bicaranya yaitu Bahlil Lahadalia melakukan dialog dengan masyarakat Rempang. Pemerintah Indonesia berkomunikasi terhadap kasus ini adalah dengan melakukan konferensi pers yang diwakili oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia pada

25 September lalu. Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai juru bicara dari pemerintahan terkait permasalahan relokasi Rempang ini.

Peristiwa serupa terjadi dalam komunikasi krisis yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dengan masyarakat adat Sigapiton pada kasus pengembangan Toba Caldera Resort di Indonesia (Panjaitan et al., 2023). Pemerintah terkesan menggunakan bahasa informasi yang sulit dipahami oleh masyarakat adat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, antara lain pihak pemerintah mempunyai kepentingan pembangunan dan sebaliknya masyarakat adat mempunyai kepentingan kelestarian lingkungan. Selain terjadi di wilayah danau Toba terdapat wilayah lain yang terjadi kesenjangan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat adat yaitu konflik sosial antara Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan masyarakat adat Helong dalam kebijakan Pembangunan Bendungan Kolhua 2010-2022 (Baun, 2022). Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan pemahaman, nilai, kepentingan, masalah pribadi, dan latar belakang sejarah. Masyarakat menganggap Pemerintah tidak terbuka dan tidak amanah terhadap perencanaan pembangunan bendungan. Selain itu, solusi yang diberikan Pemerintah tidak membantu masyarakat.

Gap komunikasi juga terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam kasus resistensi masyarakat terhadap rencana pembangunan bendungan Lambo (Dodolwa, 2019). Kedua belah pihak mempunyai pemahaman masing-masing terhadap pemaknaan resistensi yang menyebabkan terhambatnya proses sosialisasi rencana pembangunan bendungan Lambo. Resistensi masyarakat adat terhadap pembangunan infrastruktur juga terjadi di wilayah Yogyakarta (Mawadati & Fajri, 2018). Rencana pembangunan bandara baru di Temon Kulon Progo, Yogyakarta mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Masyarakat beranggapan bahwa pembangunan bandara baru ini merugikan mereka, karena mereka memiliki kekhawatiran akan tidak bisanya memperoleh pekerjaan lain apabila mereka direlokasi. Dalam hal ini Pemerintah berupaya untuk melakukan manajemen krisis dengan memanfaatkan media massa sebagai media komunikasi dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Kesenjangan komunikasi antara Pemerintah juga terjadi di wilayah Papua Barat, kesenjangan tersebut berasal dari konflik sosial antara pemerintah dengan masyarakat adat Papua yang menamakan dirinya sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Bachtiar et al., 2022). Latar belakang konflik ini

dikarenakan krisis keamanan di Papua Barat yang kian memanas, berujung pada penembakan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh kelompok kriminal bersenjata yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Imbasnya tak hanya kepada aparat tetapi masyarakat sipil juga menjadi korban dalam insiden tersebut.

Praktik kehumasan di Ukraina menggunakan saluran komunikasi sosial media untuk menjelaskan isu-isu invansi Rusia yang ingin menguasai beberapa wilayah. Hal ini merupakan perebutan tanah antara Ukraina dengan Rusia (Boatwright & Pyle, 2023). Penelitian di Serbia yang dilakukan oleh (Kešetović et al., 2017) menemukan bahwa komunikasi krisis yang dilakukan masih kurang terencana dari segi pengimplementasiannya. Bencana alam yang terjadi di Serbia yaitu “May Floods” dianggap masyarakat bukan sebagai kejadian alami atau kehendak Tuhan melainkan sebagai kelalaian Pemerintah Serbia karena tidak dapat mencegah terjadinya bencana tersebut.

Dalam penelitian (Magen, 2014) mengenai komunikasi krisis di Israel yang kurang memanfaatkan teori tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara realitas krisis dengan penelitian yang dilakukan oleh praktisi Humas. Praktisi Humas Israel mempunyai peran penting dalam manajemen krisis, tetapi kurang mendapat perhatian dalam penelitian. Sedangkan dalam penelitian (Huang & Kim, 2018) ditemukan bahwa pentingnya peran Humas Tiongkok Raya dalam menjaga kepercayaan dan mengelola komunikasi dengan masyarakat. Penelitian (Copeland, 2023) mengungkapkan bahwa politisasi yang dilakukan adalah sebagai bagian dari gerakan menentang pembangunan yang merugikan masyarakat adat. Politisasi strategis ini membantu menjelaskan kepada masyarakat adat yang lebih luas tentang manfaat ekonomi.

Melalui penelitian-penelitian yang telah ada, masih segelintir penelitian yang membahas mengenai komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus pemindahan atau penggusuran masyarakat dari tanah adat yang mereka diami sejak lama. Penelitian yang dilakukan di internasional juga tidak banyak membahas tentang komunikasi krisis pemerintah terhadap pemindahan tanah atau tempat tinggal masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah negara lain tidak bertangan besi seperti Pemerintah Indonesia. Penelitian terkait komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus penggusuran masyarakat dari

tanah adatnya perlu dilakukan untuk melihat apakah pemerintah masih mengabaikan aspirasi dan suara dari masyarakat dan apakah dengan menggunakan *spokesperson* atau juru bicara sebagai perwakilan dari pemerintahan dapat menangani kasus-kasus seperti ini dengan baik. Urgensi penelitian ini adalah publik ingin mengetahui respons pemerintah ketika melaksanakan kegiatan penggusuran, maka dari itu terjadilah konferensi pers tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini melihat dari aspek serta kajian semiotika Charles Sanders Peirce untuk menemukan tanda dan makna dari pesan-pesan yang disampaikan Bahlil Lahadalia sebagai *spokesperson* Pemerintah Indonesia dalam praktik kehumasan yakni konferensi pers. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan dua teknik yakni, pengumpulan data primer yang berasal dari konferensi pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam” yang disiarkan langsung pada tanggal 25 September melalui kanal *Youtube* Kementerian Investasi – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dari berbagai macam sumber yakni penelitian terdahulu, buku, jurnal, serta artikel. Intensi penelitian ini adalah melihat tanda-tanda dari kalimat yang dilontarkan oleh Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam” sehingga dapat diketahui bagaimana analisis isi pesan konferensi pers ketika krisis relokasi Rempang berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul **“Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus Relokasi Rempang, Kota Sejarah Melayu di Batam”**.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui isi pesan konferensi pers pada krisis relokasi Rempang yang berlangsung. Yang terdiri dari:

1. Pembukaan konferensi pers
2. Isi konferensi pers
3. Penutupan konferensi pers

1.3 Masalah Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka fokus perkara penelitian yang akan diteliti ialah

“Bagaimana analisis isi pesan konferensi pers ketika krisis relokasi Rempang berlangsung?”

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini ada pada level nasional dan bukan level daerah. Hal tersebut dikarenakan perwakilan Pemerintah Indonesia yang menjadi juru bicara adalah Menteri bukan Gubernur serta tahapan komunikasi krisis pada penelitian ini berada pada level penanganan krisis.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia dalam melakukan komunikasi krisis pada penanganan masalah relokasi yang dialami oleh masyarakat pulau Rempang.
2. Penulis dapat memberikan informasi yang belum diketahui oleh pembaca terkait kasus relokasi Rempang.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan pengetahuan terhadap komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah relokasi Rempang di Kota Batam.
2. Penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi sumber referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya

1.6 Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul, “**Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus Relokasi Rempang, Kota sejarah Melayu di Batam**” ini direncanakan akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan yang diawali dengan pembuatan proposal sampai sidang, dimulai dari Desember 2023 sampai dengan Agustus 2024. Berikut dapat dilihat pada tabel 1.1 merupakan waktu dan periode penelitian:

No	Kegiatan	Bulan (2023-2024)								
		DES 2023	JAN 2024	FEB 2024	MAR 2024	APR 2024	MEI 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGU 2024
1	Pencarian dan penentuan judul									
2	Bab 1									
3	Bab 2									
4	Bab 3									
5	<i>Desk Evaluation</i>									
6	Bab 4									
7	Bab 5									
8	Sidang Skripsi									

Tabel 1. 1 Tabel Waktu dan Periode Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti